

## IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI DESA MAYANG SARI

**Seri Hartati**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab  
[seri.hartati@univrab.ac.id](mailto:seri.hartati@univrab.ac.id)  
\*Corresponding author

**Mhd Rafi Yahya**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab  
[mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id](mailto:mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id),

**Sutrisno**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab  
[sutrisno@gmail.com](mailto:sutrisno@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to examine the implementation of food resilience programs, including: the implementation of food resilience programs in the field of red chili farming in Mayang Sari Village, the causes of not optimal implementation of food security programs in the village. Based on pre-research research, it is known that Mayang Sari Village was the village that started the food security program first even though it used private funds and land and did not receive support from the village government. This study used qualitative research methods. The types and sources of data in this research consist of primary data and secondary data whose sources were obtained through interviews and documentation, then analyzed qualitatively. Meanwhile, the theory used is Siagian Theory regarding things that must be considered in implementing a program. The results of the research show that there are criteria for implementing a food security program, namely: targets to be achieved, the need for a time period to complete the work, costs required, types of activities to be carried out, and skilled workers in their respective fields. This shows that it has not been implemented effectively. The causes that influence the implementation of food security programs in the agricultural sector are the village government itself and natural factors.*

*Keywords: Food Resilience, Agriculture, Village*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program ketahanan pangan, meliputi: implementasi program ketahanan pangan di bidang pertanian cabai merah di Desa Mayang Sari, penyebab belum optimalnya implementasi program ketahanan pangan di desa tersebut. Berdasarkan penelitian pra-penelitian, diketahui bahwa Desa Mayang Sari merupakan desa yang memulai program ketahanan pangan terlebih dahulu meskipun menggunakan dana dan lahan pribadi serta tidak mendapat dukungan dari pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang sumbernya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah Teori Siagian mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

kriteria dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan, yaitu: target yang ingin dicapai, perlunya jangka waktu penyelesaian pekerjaan, biaya yang dibutuhkan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan tenaga kerja yang terampil di bidangnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut belum terlaksana secara efektif. Penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan pangan di sektor pertanian adalah pemerintah desa itu sendiri dan faktor alam.

Kata kunci: Ketahanan Pangan, Pertanian, Desa

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan agraris, dimana terdiri dari banyak pulau, dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya bercocok tanam atau petani (Maleiku, 2022). Pertanian merupakan sektor terpenting sebagai penopang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, khususnya kebutuhan hidup makanan pokok manusia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara (Sari & Pratiwi, 2018). Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk.

Sebagai negara agraris yang mempunyai potensi tinggi terhadap sektor pertanian, Indonesia masih mengalami masalah ketersediaan pangan, hal itu terkait dengan masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Seperti di Negara Slovakia, pertanian selalu menjadi salah satu bagian terpenting. Promosi kegiatan komersial dan pekerjaan yang berkelanjutan untuk daerah pedesaan sangat penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan kepadatan penduduk pedesaan (Rodeni, Jaenudin, & Subandi, 2018).

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian (Saepudin, 2018). Basis pembangunan pedesaan bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dalam satu wilayah dengan keterpaduan sarana dan prasarana dalam aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu membangun daerah pedesaan sangat penting terutama dalam hal penyediaan bahan baku pangan untuk penduduk, penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan (Saepudin, 2018), penyediaan bahan baku untuk industri dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan ekspor. Jadi, desa

merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Saepudin, 2018).

Ketahanan Pangan telah menjadi masalah dalam kerangka pembangunan pertanian (Yennita Sihombing, 2022), ditunjukkan dengan dijadikannya ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian dengan meningkatkan ketahanan pangan dimasyarakat (Syahrier, 2022). Dalam Kabinet Persatuan Indonesia maju, disamping fokus lainnya yaitu pengembangan agribisnis dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani masalah ketahanan pangan yaitu Badan Urusan Ketahanan Pangan dari Pemerintah pusat sampai Pemerintah Desa (Kurnia, Sundari, & Purwanto, 2020).

Badan Ketahanan Pangan merupakan lembaga pemerintah yang wewenang untuk pemenuhan konsumsi pangan yang berbasis pada budaya daerah, potensi pangan daerah, dan kearifan lokal (Syamsuadi, Hartati, Trisnawati, & Arisandi, 2020). Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan yang dimulai dari daerah, maka Badan Ketahanan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Progam Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada tahun 2006 (Setyo Harsanti, Murdiyanto, & Dara Senjawati, 2018). Progam ini dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/ *twin track strategy*, yang meliputi :

1. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
2. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Sebenarnya masalah ketahanan pangan ini sendiri disebabkan pada rendahnya keterjangkauan pangan sebagian penduduk (Pamungkasih, Sukardi, & Julijanti, 2021). Keterjangkaun pangan masyarakat harus memenuhi tiga hal yaitu fisik, ekonomi dan sosial(Syahrier, 2015). Keterjangkauan fisik artinya masyarakat dapat menjangkau pangan dengan mudah karena adanya dukungan prasarana dan sarana mobilitas maupun pasar yang memadai(Syamsuadi et al., 2020). Keterjangkauan ekonomi artinya jika masyarakat mempunyai daya beli yang cukup

untuk mendapatkan bahan pangan sesuai kebutuhan dan pilihan setiap individu anggotanya . Keterjangkauan sosial artinya jika masyarakat terlayani oleh sistem perlindungan sosial yang membantunya mendapatkan pangan pada saat mengalami kekurangan. Mengatasi permasalahan ketahanan pangan dibutuhkan respon jangka pendek dan jangka panjang guna meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan pertanian. Investasi inovasi merupakan masalah yang kritical untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan tantangan jangka panjang, yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Tantangan di masa datang diprediksi semakin banyak, dengan populasi penduduk yang kian meningkat, pada saat yang sama produksi pangan harus mempertimbangkan tantangan lain seperti perubahan iklim dan kelangkaan air (Arisandi, Trisnawati, & Syamsuadi, 2022).

Desa Mayang Sari ini merupakan salah satu desa pertanian yang dapat dikatakan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Bila dilihat dari potesi sumber daya alam sesungguhnya Desa Mayang Sari ini memiliki prospek yang cukup baik dan cukup menjanjikan apabila masyarakat desa sepenuhnya menyadari bahwa bidang pertanian dapat dijadikan asset untuk masa depan mereka. Akan tetapi, selain tidak ikut sertanya pemerintah desa dalam kegiatan pertanian ini juga terdapat beberapa hambatan-hambatan lainnya, seperti sumberdaya manusia yang rendah, sikap mental masyarakat yang belum menyadari bahwa lahan pertanian dapat dijadikan sebagai mata pencaharian utama, aspek kewirausahaan belum tumbuh secara nyata, kurangnya modal dan juga kelompok tani yang belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, faktor cuaca juga sangat berpengaruh dalam menjalankan usaha taninya. Cuaca yang sulit untuk diprediksi secara langsung akan berpengaruh terhadap kualitas dan hasil tanaman petani.

Kelompok tani di desa dianggap sebagai salah satu pendukung dalam mengakses berbagai informasi tentang pertanian. Maka dari itu perlunya dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar mampu meningkatkan ketahanan pangan. Pemberdayaan dianggap penting dalam meningkatkan taraf hidup, tingkat kesejahteraan serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan di Desa Mayang Sari ini seharusnya dilakukan melalui penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi tentang teknologi baru, cara bercocok tanam dan menggunakan pestisida yang baik. Penyuluhan ini disampaikan kepada kelompok tani setempat oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).

## **STUDI LITERATUR**

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Menurut Anderson dan Edward (Kurnia et al., 2020) Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan itu ditetapkan dan disepakati. Menurut Tachjan Implementasi Kebijakan adalah suatu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik (Djiko & H. S. Tangkau, 2018). Suatu program atau kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki tujuan. Menurut Nugroho berpendapat bahwa suatu kebijakan tidak berarti apabila tidak diimplementasikan (Setyo Harsanti et al., 2018). Sebaik apa pun integritas suatu kebijakan, apabila implementasinya tidak dilaksanakan secara maksimal, maka integritas kebijakan publik akan menjadi sebuah wacana yang tiada makna (S Hartati, Syamsuadi, & Arisandi, 2020). Walaupun Implementasi berbeda dengan Integritas kebijakan, bukan berarti keduanya dapat dipisahkan (Syamsuadi et al., 2020). Langkah Integritas Kebijakan adalah langkah yang bersifat teoritis, sedangkan langkah Implementasi Kebijakan bersifat praktis (Syamsuadi, Sepriyani, Endrini, & Febriani, 2022). Suatu keberhasilan dari tujuan suatu kebijakan yang telah diintegritaskan sangat ditentukan oleh langkah implementasi (Syamsuadi et al., 2023).

Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa yang sulit seperti sekarang ini ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindari dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Dari sini petani sebagai tonggak utama pada pemenuhan pangan masyarakat juga merasakan dampaknya. Seperti harus memenuhi permintaan yang cukup tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan banyak hal-hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi agar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pada masa pandemi di Indonesia tetap terjamin (Indahsari, Muhammad, & Marsaoly, 2022).

Dalam reaktivasi program lumbung pangan, selain pengembangan sentra produksi, pemerintah mengembangkan sistem penyimpanan cadangan pangan cadangan dan sistem distribusi. Reaktivasi ini dinyatakan bukan sebagai program cetak sawah tetapi sebagai pengembangan pusat pangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Menurut Moleong secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian atau informan (Moleong, 2006). Metode ini digunakan untuk mendapat wawasan tentang sesuatu yang baru, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang ada di lapangan. Observasi juga dilakukan untuk melengkapi data dan dokumentasi. Diharapkan dengan metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi ketahanan pangan di desa Mayang Sari.

Dalam melakukan analisis kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Bambang Ali Wahyudi), Ketua Kelompok Pertanian dan masyarakat Desa Mayang Sari kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan, ada beberapa tahapan penelitian diantaranya pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

## **PEMBAHASAN**

Program ketahanan pangan adalah pelaksanaan program oleh pihak-pihak yang menjalankan tugas yang menjadi penggerak dan alat untuk mencapai keberhasilan Implementasi program ketahanan pangan. Keberhasilan suatu program dapat ditentukan dengan adanya pelaksanaan program yang baik. Ketika pelaksanaan program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilan program juga tinggi, begitu juga sebaliknya apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup maka dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi program ketahanan pangan ini.

Adapun hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai implementasi program ketahanan pangan dalam bidang pertanian di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun berjalan sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan terus berlanjutnya kegiatan penanaman cabe merah kerting yang dilaksanakan mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan

menghasilkan produksi cabe merah keriting yang terus meningkan dari tahun ke tahun.

Untuk menjalankan kegiatan program ketahanan pangan di Desa Mayang Sari, masyarakat desa tidak melakukan hal tersebut secara sendiri. Mereka mendapatkan bantuan dari *stakeholder* lain yang terdiri dari Dinas Pertanian, Aspirasi DPRD dan Dinas Sarana dan Prasarana Kabupaten Pelalawan. Hal ini yang membuat setiap kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Disini keterlibatan para *stakeholder* nya dapat dilihat dari bantuan yang diberikan yang berupa bantuan alat-alat pertanian, pupuk, bibit cabe serta sejumlah dana yang digunakan untuk setiap kegiatan program ketahanan pangan di Desa Mayang Sari tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan tadi diatas tentang implementasi program ketahanan pangan di bidang pertanian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam implementasi program ketahanan desa tersebut, yaitu diantaranya:

1. Sasaran yang hendak dicapai,
2. Diperlukannya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan,
3. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan,
4. Perlunya biaya yang besar disertai sumbernya dan
5. Dibutuhkan tenaga kerja dari segi jumlahnya maupun dari sudut kualifikasi dan keahlian serta keterampilan.

Dalam implementasi suatu program kegiatan haruslah ada sasaran yang hendak dicapai, artinya suatu program tersebut haruslah mempunyai tujuan yang jelas agar tepat sasaran, dan kegiatan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

Sangatlah penting adanya tujuan- tujuan itu sehingga semua jenis kegiatan mempunyai arah yang terukur. Pemerintah Desa Mayang Sari telah merancang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan Dibidang Pertanian dan ini merupakan bagian penting dalam proses rencana dari suatu program. Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Membantu meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dan kelompok tani tentang bagaimana cara pembibitan cabe yang benar dan menghasilkan hasil panen yang optimal dan bagus
2. Memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas

3. Menjadikan masyarakat desa lebih mandiri
4. Membantu terwujudnya kecukupan pangan bagi desa dan masyarakat khususnya.

Pada dasarnya setiap program kegiatan yang akan dilakukan haruslah mempunyai *time management* yang bagus sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal segi waktu (Seri Hartati, Syamsuadi, & Arisandi, 2021). Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung berjalannya implementasi program ketahanan pangan di Desa Mayang Sari adalah merupakan rencana dari kegiatan yang sudah disusun dengan baik. Dalam proses penyusunan rencana kegiatan penanaman bibit cabe ini, masyarakat dan pemerintah desa diminta berperan aktif dalam setiap prosesnya. Hal ini dilakukan supaya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal implementasi program ketahanan desa dibidang pertanian untuk penanaman bibit cabe, kegiatan program tersebut dimulai dari pemnetukan kelompok tani, pembekalan ilmu dibidang pertanian khususnya dalam hal penanaman bibit cabe, pencarian lahan yang subur sebagai media penanaman cabe, pemilihan bibit unggul yang berasal dari varietas yang bagus, serta pemberdayaan terhadap masyarakat desa sehingga mereka bisa mengelola hasil dari sumber daya alam sekitar supaya dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka.

Setelah menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, biaya menjadi hal yang tidak kalah penting untuk berjalannya implementasi program ketahanan pangan dengan baik. Suatu program memerlukan dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan tersebut. Yang termasuk biaya dalam implementasi program ketahanan pangan ini adalah berupa pembelian bibit cabe, pupuk, dan hal lain yang dianggap penting untuk berjalan lancarnya program ketahanan pangan tersebut.

Implementasi program ketahanan pangan dibidang pertanian penanaman bibit cabe merah keriting adalah haruslah mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan terampil pada bidang pertanian supaya setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia (SDM) merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu



organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan dan merupakan sumber daya yang tidak dapat di gantikan serta menjadi aset yang penting.

Didalam peningkatan pembangunan sektor pertanian diperlukan adanya kerjasama antar pihak yang terkait seperti petani, pemerintah, lembaga peneliti pertanian, ilmuwan, innovator serta kalangan akademik maupun swasta sehingga dengan demikian diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan produksi pangan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

Didalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat peningkatan produksi pangan diantaranya menurunnya jumlah sumber daya manusia petani serta masih rendahnya kualitas petani dalam hal informasi dan teknologi pertanian, lemahnya akses modal yang didapat petani untuk mengembangkan usaha pertanian, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan untuk pengembangan Industri dan pertanian dan masih kurangnya peran lembaga penunjang atau pendukung sektor pertanian.

Untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan sektor pertanian diperlukan kebijakan, strategi dan upaya dari pemerintah secara optimal dengan dukungan dari berbagai pihak sehingga hasil produksi pangan dapat meningkat dan kebutuhan pangan terpenuhi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris dan negara maritim yang berkelimpahan sumber daya alam, Indonesia masih bergantung pada impor, petani masih miskin dan banyak usia produktif meninggalkan pertanian (Setyo Harsanti et al., 2018). Kondisi tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani, Ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran dan 50% jaringan irigasi rusak. Kedaulatan pangan di Indonesia mampu tercapai apabila terdapat arah kebijakan yang tegas dan implementasi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang(Syahrier, 2022). Selama ini, Pemerintah berupaya membuat berbagai kebijakan pertanian namun program dan kebijakan yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien dan efektif. Alokasi anggaran subsidi benih pada rata-rata hanya 2.3% per tahun dari total subsidi non energi dan rata-rata 0.4% per tahun dari total subsidi. Rata-rata subsidi pupuk 37% dari subsidi non energi dan 7% dari total subsidi. Selain anggaran sedikit,

masalah yang hampir setiap tahun terjadi adalah pupuk subsidi yang naik setiap tahun. Kenaikan harga pupuk tersebut disebabkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang disebabkan lonjakan harga gas, kenaikan harga bahan bakar minyak dan inflasi.

Indonesia, sebagai negara maritim dan agraris, memiliki kelimpahan sumber daya alam, seharusnya dapat dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Indonesia masih bergantung pada impor, petani masih miskin dan banyak usia produktif meninggalkan pertanian. Permasalahan yang sering muncul didalam pertanian dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi yaitu tentang berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran. Kedaulatan pangan ini mampu tercapai apabila terdapat arah kebijakan yang tegas dan implementasi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Melalui peningkatan produktivitas pertanian dari sektor hilir, hulu dan jasa penunjangnya, bisa mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dari kedua jurnal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang sering muncul pada ketahanan pangan dibidang pertanian adalah memang dari pemerintah nya itu sendiri, yang tidak pro kepada petani. Pemerintah hanya membuat regulasi atau kebijakan tanpa adanya kontrol dan pengawasan terhadap jalannya arah kebijakan tersebut, sehingga program yang dibuat tidak berjalan efektif dan efisien.

Masalah lain yaitu tentang anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan program yang masih belum bisa maksimal dalam penggunaan dana dari pemerintah serta keadaan geografi yaitu faktor alam berupa bencana alam yang belum dapat diminimalisir keadaannya. Jadi sangatlah jelas bahwa setiap implementasi program kegiatan haruslah mempunyai sasaran yang jelas, dana yang cukup, kegiatan yang terarah, waktu yang tepat serta tenaga yang cukup dan ahli dibidangnya. Hal demikian menjadikan setiap implementasi program dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan dibidang Pertanian Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya implementasi program ketahanan pangan dibidang pertanian cabe ini mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat sehingga program ini telah diterima baik oleh masyarakat desa namun diperlukan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Setiap jenis kegiatan yang dilakukan di Desa Mayang Sari ini sudah terencana dengan baik dan matang, juga mendapat dukungan dan partisipasi dari semua kelompok tani dan masyarakat sehingga kegiatan tersebut menjadi terarah dan berjalan secara kondusif. Perlunya biaya yang besar disertai sumbernya dan dibutuhkan tenaga kerja dari segi jumlahnya maupun dari sudut kualifikasi dan keahlian serta keterampilan. Implementasi program ketahanan pangan dibidang pertanian di Desa Mayang Sari sudah berjalan dengan baik, tetapi kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi alam yang ada di sekitar desa masih sangat terbataas dikarenakan ilmu yang dimiliki masyarakat juga terbatas.

## **REFERENSI**

- Arisandi, D., Trisnawati, L., & Syamsuadi, A. (2022). Sistem Monitoring Deteksi Dini Kebakaran Hutan Berbasis Multiplatform Di Kabupaten Siak Menggunakan SDLC Prototyping. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 3(4), 410-416. doi: <http://dx.doi.org/10.30865/json.v3i4>.
- Djiko, R., & H. S. Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 109–120. <https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738>
- Hartati, S, Syamsuadi, A., & Arisandi, D. (2020). Kebijakan Publik: Refleksi Sektor Pendidikan. *Taman Karya*.
- Hartati, Seri, Syamsuadi, A., & Arisandi, D. (2021). University Level Management Toward Industrial Revolution 4.0 using COBIT 5 Framework. *Journal of Physics: Conference Series*, 1783(1), 12021. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1783/1/012021>
- Indahsari, M., Muhammad, M., & Marsaoly, H. A. (2022). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate

- Provinsi Maluku Utara Strategy for Improving Food Security During the Covid-19 Pandemic at the Food Security Service , Ternate City , North Maluku Pro, 7(2), 1–15.
- Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional Dalam Kondisi Darurat Di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan*, 6(1), 73–99.
- Maleiku, M. S. (2022). Hasil Laut dan Kehidupan Nelayan Pulau Pura Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 6(2), 55–62.
- Moleong, L. J. (2006). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Pamungkasih, E., Sukardi, & Julijanti, F. D. (2021). Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Keluarga Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Malang. *Karta Rahardja*, 2(1), 18–26.
- Rodeni, D., Jaenudin, A., & Subandi. (2018). Hubungan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Ketahanan Pangan Keluarga. *Jurnal Agrijati*, 32(2), 89–106.
- Saepudin, E. (2018). Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung. *Sosiohumaniora*, 20(1), 86.  
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9895>
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137.  
<https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>
- Setyo Harsanti, F., Murdiyanto, E., & Dara Senjawati, N. (2018). Model perencanaan program Aksi Desa Mandiri Pangandi Desa Kebon Gunung, Purworejo. *Universitas Mercu Buana Yogyakarta-Yogyakarta*, (April), 55–61.
- Syahrier, F. A. (2015). Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Studi pada Pasar Kaget Riau Indah Lestari Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–11.
- Syahrier, F. A. (2022). DINAMIKA KEBIJAKAN LAND CONVERSION DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 5(1), 18–36.
- Syamsuadi, A., Arisandi, D., Hartati, S., Trisnawati, L., Elvitaria, L., & Nugroho, S. S. (2023).

Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8436–8450.

Syamsuadi, A., Hartati, S., Trisnawati, L., & Arisandi, D. (2020). Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM). *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(2), 114–128.

Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrab pada Program Magang Mahasiswa. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 1341–1348.

Yennita Sihombing. (2022). Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Dan Pendapatan Petani Mendukung Ketahanan Pangan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 137–143.